

**PENERAPAN ETIKA ADMNISTRASI PUBLIK DALAM PELAKSANAAN
TUGAS APARATUR BIROKRASI DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Nama : Sisilya Hlean
Pembimbing : 1. Drs. J. Mandey, Msi
2. Dra. T. Sondakh, Msi

***ABSTRACT** Civil Service Discipline stipulated in Government Regulation No. 30 of 1980 that was later revised in Government Regulation No. 53 of 2010. The purpose of this study is to investigate the application of public administration ethics / duties of the State in the implementation of the bureaucratic apparatus in the district secretariat Talaud Islands. The method used is descriptive. The focus of this study: Responsibility, Service,; Faithfulness,; Sensitivity, Similarities,; Deserving. Data sources / informants drawn from the number of employees by 10 informants structural officials, and 10 staff employees, the number of informants as many as 20 people. Collecting data using interview techniques. Analysis of the data used is descriptive analysis techniques interaaktif models. Based on the analysis of data drawn the conclusion that the application of ethics in the discharge of public administration that appears on the attitudes and behavior of personnel in performing their duties and responsibilities of office as, devotion, loyalty, sensitivity, equality, and decency in the bureaucratic apparatus regional secretariat Talaud Islands in general carried out effectively.*

Based on the results of the study generally recommended advice to the government secretariat Talaud Islands region through the implementation of public administration ethics are viewed from the aspect of responsibility, devotion, loyalty, sensitivity, equality and kepatasanya now rightly claim to do the moral or ethical considerations in conducting action intensified to more streamlined.

Keywords: Application of the Public Administration Ethics

PENDAHULUAN

Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan , yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan

fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara tentang Etika Birokrasi berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, pantas untuk dilakukan dan sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan dilaksanakan. (MH: 2009).

Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, suatu nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan pengaruh secara moral. Dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan yang etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia terdorong untuk menjaga amanah yang diberikan, melalui pencitraan perilaku hidup sehari-hari.

Berbicara mengenai etika pemerintahan tidak terlepas dari etika birokrasi, birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Negara

dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (*public goods and services*) baik secara langsung maupun tidak. Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.

Ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang kemudian di revisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur hal-hal sebagai berikut : Kewajiban, larangan, sangsi, tata cara pemeriksaan, tata cara pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin yang kesemuanya dapat menjadi acuan dalam beretika bagi seorang aparat Birokrasi atau Pegawai Negeri.

Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar karena selama ini aparatur pemerintah/birokrasi di daerah belum dapat menunjukkan kinerja yang maksimal sebagaimana harapan masyarakat. Hal tersebut tampak pada pelaksanaan dan hasil kerja aparatur birokrasi di daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik

yang maksimal sehingga sering menyebabkan munculnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu masih sering terdapat praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan liar, pemborosan kekayaan daerah, dan lain-lain bentuk penyelewengan dilakukan oleh kalangan pegawai negeri sipil di daerah.

Kinerja yang belum maksimal tersebut tentunya tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kemampuan pengetahuan dan keterampilan / kecakapan bekerja, tetapi juga bersumber dari sikap dan perilaku yang tidak baik dari aparatur birokrasi tersebut dalam melaksanakan tugas dan melakukan tindakan jabatannya seperti : tidak suka berdisiplin tinggi, kurang bertanggung jawab, tidak mau bekerjasama, tidak/kurang bersemangat, tidak mau berinisiatif dalam memecahkan persoalan yang muncul, dan lain-lain sebagainya.

Sikap atau perilaku tidak baik yang masih ditemui dikalangan aparatur birokrasi tersebut tercipta disebabkan antara lain kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap etika administrasi publik/negara yang berlaku bagi segenap aparatur pemerintah/birokrasi.

Secara umum diketahui bahwa etika administrasi negara/publik merupakan ketentuan-ketentuan atau standar-standar yang mengatur perilaku moral para aparatur negara/pemerintah. Etika administrasi publik/negara berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparat negara/pemerintah dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya. Etika administrasi publik/negara memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku dan kebajikan moral yang dapat diterapkan oleh setiap aparat (Gie, 2000). Etika administrasi publik dapat dianalogikan dengan system sensor pada administrasi publik; ia dapat berpengaruh terhadap dimensi-dimensi administrasi publik lainnya, dan sangat mempengaruhi tercapai-tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya dan tujuan organisasi publik pada khususnya. Karena itu, etika administrasi publik dianggap sebagai dimensi strategis dalam administrasi publik (Keban, 2008; Santosa, 2008).

Akan tetapi dalam kenyataannya etika yang berlaku bagi aparatur pemerintah/birokrasi selama ini seperti kode etik Pegawai Negeri Sipil, Etika Jabatan, Sumpah Jabatan, aturan Disiplin,

dan lain-lain tidak diperhatikan atau masih sering diabaikan dan tidak banyak diterapkan oleh kalangan aparatur birokrasi di dalam melaksanakan tugas dan melakukan tindakan jabatannya, sehingga berbagai perilaku atau tindakan tidak baik atau tidak benar masih sering dilakukan oleh kalangan aparatur birokrasi.

Dengan demikian di Sekretariat Daerah Kabupaten kepulauan talaud telah menerapkan etika administrasi publik dalam pelaksanaan tugas aparatur birokrasi,. Namun apakah penerapan etika administrasi publik dalam pelaksanaan tugas aparatur birokrasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.?, dan apakah penerapan etika administrasi publik dalam pelaksanaan tugas aparatur birokrasi di secretariat daerah kabupaten kepulauan talaud tersebut telah berjalan secara efektif?; hal itu nampaknya masih merupakan suatu permasalahan yang perlu dijawab dan dikaji melalui suatu penelitian.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, jenis data, dan sebagainya (Sugiono, 2002). Sesuai

dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan dimuka, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Arikunto (2000), bahwa penelitian defkriptif merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan dan menguji hipotesis. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini menghimpun fakta akan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

B. Definisi Konsepsional Fokus Penelitian

Konsep yang menjadi focus penelitian ini ialah etika adinistrasi publik, yang secara konsepsional dapat didefisikan nilai-nilai, norma-norma atau standard-standard yang mengatur perilaku moral segenap aparatur pemerintah/birokrasi di dalam menjalankan tugas dan melakukan tindakan jabatannya, seperti : kode etik aparatur birokrasi/PNS, etika jabatan, sumpah jabatan, peraturan disiplin, dan lain sebagainya yang mengandung nilai-nilai etis/etika. Penerapan etika administrasi publik tersebut akan nampak pada sikap dan perilaku aparatur dalam menjalankan tugas dan jabatan.

C. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini ialah data primer atau data yang bersumber langsung dari informan/responden yang ditentukan. Selain itu juga dikumpulkan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.

D. Subyek Penelitian (Informan)

Subyek penelitian ini (informan/responden) adalah para aparatur birokrasi/PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jumlah Aparat/PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebanyak 184 orang yang terdiri dari 53 orang sebagai pejabat struktural dan 131 orang sebagai pegawai staf. Dari jumlah pegawai tersebut diambil sebanyak 10 informan pejabat struktural, dan 10 orang pegawai staf. Informan penelitian tersebut diambil dengan teknik random atau acak, dengan demikian jumlah dari informan sebanyak 20 orang.

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Wawancara ; digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu

dengan cara melakukan dialog langsung dengan para informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

- Observasi; yaitu melakukan pengamatan secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan obyek/fokus yang diteliti, guna melengkapi data primer hasil wawancara.
- Studi dokumentasi; yaitu melakukan mengumpulkan data sekunder sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menghimpun dan menelaah data yang telah tersedia di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut :

- Penilaian data ; yaitu melakukan penilaian terhadap data dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas, dan reliabilitas dengan cara mengkategorisasi data dalam system pencatatan yang relevan.

- Analisis dan interpretasi data ; dilakukan dengan cara menganalisis data dengan pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris terhadap data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan.
- Penyimpulan terhadap hasil analisis dan interpretasi data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian metodologi diatas bahwa yang menjadi focus dalam penelitian ini ialah etika adinistrasi publik, yang secara konsepsional dapat didefisikan nilai-nilai, norma-norma atau standard-standard yang mengatur perilaku moral segenap aparatur pemerintah/birokrasi di dalam menjalankan tugas dan melakukan tindakan jabatannya, seperti : kode etik aparatur birokrasi/PNS, etika jabatan, sumpah jabatan, peraturan disiplin, dan lain sebagainya yang mengandung nilai-nilai etis/etika. Penerapan etika administrasi publik tersebut akan nampak pada sikap dan perilaku aparatur dalam menjalankan tugas dan jabatan, seperti :

(a) Tanggung jawab, yakni merasa memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat dalam menjalankan tugas secara

memuaskan; (b) Pengabdian, yakni menjalankan tugas dengan sepenuh tenaga, semangat dan perhatian tanpa pamrih; (c) Kesetiaan, yakni sadar untuk setulusnya patuh kepada konstitusi dan tugas jabatan; (d) Kepekaan, yakni kemauan dan kemampuan untuk memperhatikan serta siaga terhadap perkembangan baru dalam menjalankan tugas; (e) Persamaan, yakni pemberian perlakuan, pelayanan dan pengabdian yang sama kepada semua pihak; (f) Kepantasan, yakni melakukan hal yang sepatutnya menuntut pertimbangan moral atau nilai etis dalam melakukan tindakan.

Sesuai dengan hasil penelitian tersebut maka dilakukan wawancara terhadap informan yang diambil dari berbagai unsur terkait dengan penerapan etika administrasi publik yaitu : pejabat structural, pegawai staf, dan unsur masyarakat. Jumlah informan yang berhasil diwawancarai ada sebanyak 15 orang. Data atau informan yang di peroleh dari wawancara dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model interaktif.

Berkenan dengan penerapan Etika Administrasi Publik dalam pelaksanaan tugas aparatur birokrasi berikut petikan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten kepulauan talaud yang berkenan dengan :

a) Tanggungjawab

Tanggung jawab, yakni merasa memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat dalam menjalankan tugas secara memuaskan dalam birokrasi pemerintahan aparatur sekretariat daerah kabupaten kepulauan talaut berikut petikan wawancara untuk menjawab aspek tanggungjawab tersebut yang ada dalam aparatur birokrasi sekretariat daerah dalam penerapan etika administrasi public.

Hasil wawancara dengan para informan dan juga informan lainnya secara keseluruhan menunjukkan bahwa peranan etika administrasi public dalam tugas aparatur birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan talaud melalui Tanggung jawab, yakni merasa memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat dalam menjalankan tugas secara memuaskan telah di laksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi di laksanakan cukup efektif oleh Aparatur birokrasi/PNS Sekretariat Daerah Kepulauan Talaud.

b) Pengabdian

Pengabdian, yakni menjalankan tugas dengan sepenuh tenaga, semangat

dan perhatian tanpa pamrih dalam birokrasi pemerintahan sekretariat daerah kabupaten kepulauan talaut.

Hasil wawancara lewat informan tersebut diatas bahwa peranan etika administrasi public dalam pelaksanaan tugas birokrasi lewat pengabdian cukup efektif yang ada di aparatur birokrasi/PNS sekretariat daerah kabupaten kepulauan talaud.

Peranan Etika administrasi public dalam pelaksanaan tugas aparatur birokrasi yang di lihat lewat Kesetiaan, yakni sadar untuk setulusnya patuh kepada konstitusi dan tugas jabatan; berikut petikan wawancara terhadap beberapa informan mengenai

c) Kesetiaan

Kesetiaan, yakni sadar untuk setulusnya patuh kepada konstitusi dan tugas jabatan dalam penerapan etika administrasi public yang ada di birokrasi pemerintah sekretariat daerah kabupaten kepulauan talaut berikut petikan wawancara dari beberapa informan untuk menjawab masalah kesetiaan dalam penerapan etika administrasi public

Dengan demikian peranan etika administrasi publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi birokrasi yang berkaitan dengan kesetiaan yakni sadar untuk setulusnya patuh kepada konstitusi dan

tugas jabatan telah cukup efektif dalam penerapan etika di sekretariat daerah kabupaten kepulauan talaud.

d) Kepekaan

Kepekaan, yakni kemauan dan kemampuan untuk memperhatikan serta siaga terhadap perkembangan baru dalam menjalankan tugas sebagai birokrasi pemerintah kabupaten kepulauan talaut dalam menerapkan etika administrasi public di sekretariat daerah kabupaten kepulauan talaut berikut petikan hasil wawancara dari beberapa informan penelitian adalah sebagai berikut:

Penerapan etika administrasi publik dalam pelaksanaan tugas aparatur birokrasi disekretariat daerah yang dilihat lewat persamaan yakni pemberian perlakuan, pelayanan dan pengabdian yang sama kepada semua pihak, berikut petikan hasil wawancara lewat informan penelitian sebagai berikut:

e) Keadilan / Persamaan

Persamaan, yakni pemberian perlakuan, pelayanan dan pengabdian yang sama kepada semua pihak dalam penerapan etika administrasi public dalam unit kerja pemerintah sekretariat daerah kabupaten kepulauan talaud, berikut petikan hasil wawancara untuk menjawab masalah dalam penelitian

mengenai keadilan atau persamaan dalam penerapan etika administrasi public

Dengan demikian hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian mengenai penerapan etika administrasi publik dalam pelaksanaan tugas birokrasi aparatur sekretariat daerah pemerintah kabupaten kepulauan talaut tentang persamaan yakni pemberian perlakuan, pelayanan dan pengabdian yang sama kepada semua pihak telah dilaksanakan dengan cukup efektif.

f) Kepantasan

Kepantasan, yakni melakukan hal yang sepatutnya menuntut pertimbangan moral atau nilai etis dalam melakukan tindakan dalam penerapan etika administrasi public yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan yang ada dalam unit kerja masing-masing, berikut petikan hasil wawancara yang dapat dijabarkan oleh beberapa informan untuk menjawab masalah aspek kepantasan dalam penerapan etika administrasi public

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi publik dalam pelaksanaan tugas birokrasi disekretariat daerah kabupaten kepulauan talaud dilihat dari segi moral kepantasan yakni melakukan hal yang sepatutnya menuntut pertimbangan moral atau nilai

etis dalam melakukan tindakan telah dilakukan secara efektif.

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian diatas bahwa Yang menjadi kewajiban dan harus ditaati oleh aparatur birokrasi dalam pelaksanaan tugas di kabupaten kepulauan talaud sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,

Etika dalam administrasi adalah bagaimana membuat keterkaitan keduanya. Bagaimana gagasan administrasi seperti efisiensi, ketertiban, kemanfaatan, produktifitas dapat menjawab etika dalam prakteknya. Serta bagaimana gagasan dasar etika dapat mewujudkan yang baik dan menghindari hal yang buruk itu dapat menjelaskan hakekat administrasi.

Diperlukan etika dalam administrasi di birokrasi secretariat daerah kabupaten kepulauan talaud karena ini akan memberikan contoh yang baik, sebab setiap orang sebenarnya memiliki kesadaran masing-masing namun tidak pernah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Etika perlu dikembangkan, terutama dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan, dimana etika administrasi memiliki fungsi sesuai penerapan pada bidangnya

tersebut. Etika ini akan membuat seseorang bisa berdisiplin, bertanggung jawab atas semua sikap dan perbuatan yang dilakukan. Etika dalam birokrasi pemerintahan sangatlah penting, dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam struktur birokrasi pemerintahan dan dapat mengoptimalkan kinerja birokrasi dalam melakukan pelayanan pada masyarakat.

Alasan dari pentingnya etika dalam birokrasi adalah ketika dihadapkan pada kenyataan yang jauh dari harapan, dimana aparatur di birokrasi diharapkan bekerja dengan penuh rasa Kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai kekuasaan birokrasi dan implikasi kekuasaan hanya dapat dilakukan melalui pengembangan etika birokrasi. Etika ini dapat menjadi sumber tuntunan dan sekaligus tantangan bagi praktisi administrasi publik dan semua pihak yang menginginkan perbaikan kualitas birokrasi di Indonesia. Para perangkat birokrasi di Indonesia, yaitu Pegawai Negeri (baik Sipil maupun Militer) secara organisasi dan hierarki melakukan tugas dan fungsi masing-masing sesuai aturan yang ditetapkan. Adanya kode etik pegawai negeri yang diatur dalam Undang-undang Kepegawaian Negara, juga adanya penegakan hukum yang

tegas akan memberikan pagar yang jelas bagi ruang gerak birokrat agar sesuai aturan yang berlaku. Etika birokrasi menjadi norma yang melekat pada perangkat birokrasi itu sendiri dimanapun dan kapanpun aparat berada, baik ketika menjalankan tugas di kantor maupun saat berada di tengah-tengah masyarakat setelah usai jam kerja.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut di atas sesuai dengan penerapan etika administrasi publik yang Nampak pada sifat dan perilaku aparatur birokrasi secretariat daerah kabupaten kepulauan talaud dalam menjalankan tugas dan jabatan seperti Tanggung jawab, yakni merasa memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat dalam menjalankan tugas secara memuaskan; Pengabdian, yakni menjalankan tugas dengan sepenuh tenaga, semangat dan perhatian tanpa pamrih; Kesetiaan, yakni sadar untuk setulusnya patuh kepada konstitusi dan tugas jabatan; Kepekaan, yakni kemauan dan kemampuan untuk memperhatikan serta siaga terhadap perkembangan baru dalam menjalankan tugas; Persamaan, yakni pemberian perlakuan, pelayanan dan pengabdian yang sama kepada semua pihak; Kepantasan, yakni melakukan hal yang sepatutnya menuntut pertimbangan moral atau nilai etis dalam melakukan

tindakan telah di laksanakan dengan cukup efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang kemudian di revisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur hal-hal sebagai berikut : Kewajiban, larangan, sangsi, tata cara pemeriksaan, tata cara pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin yang kesemuanya dapat menjadi acuan dalam beretika bagi seorang aparat Birokrasi atau Pegawai Negeri.

Peraturan disiplin Pegawai Negeri sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin, dengan demikian dapat di tarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penerapan etika administrasi publik dalam pelaksanaan tugas akan Nampak pada sikap dan perilaku aparatur dalam menjalankan

tugas dan jabatan seperti tanggungjawab, pengabdian, kesetiaan, kepekaan, persamaan, dan kepatantasan dalam aparatur birokrasi sekretariat daerah kabupaten kepulauan talaud pada umumnya dilakukan dengan efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat direkomendasikan secara umum saran untuk pemerintah sekretariat daerah kabupaten kepulauan talaud lewat penerapan etika administrasi publik yang dilihat dari aspek tanggungjawab, pengabdian, kesetiaan, kepekaan, persamaan dan kepatantasan yakni melakukan hal yang sepatutnya menuntut pertimbangan moral atau nilai etis dalam melakukan tindakan lebih diintensifkan untuk lebih diefektifkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2000. *Pemerintahan Yang Baik, Tanggap, Efisien, dan Akuntabel, Kontrol atau Etika. Seminar Forum Kebijakan Publik.* Jogjakarta : Program Pascasarjana UGM.
- Arikunto Suharsimi, 2000, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Blau Peter dan Marshall Meyer, 2000, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, terjemahan, Rajawali, Jakarta.
- Gie The Liang, 2000, *Etika Administrasi Pemerintahan*, Karunika-UT, Jakarta.
- Heady Ferrel, 1977, *Public Administration : A Comparative Perspective*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Islamy Irfan, M. 2007, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Keban Yeremias, T. 2008, *Enam Dimensi Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kumorotomo Wahjudi, 2001, *Etika Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- MH Ismail. 2009. *Etika Birokrasi*. Malang : Averroes.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Santosa Pandji, 2008, *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*, Rafika Aditama, Bandung.
- Sedarmayanti, 2009, *Manajemen Sumberdaya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen*

- Pegawai Negeri Sipil*, Rafika Aditama, Bandung.
- Siagian,S.P. 2001, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Solomon Robert, 1997, *Ethics, A Brief Introduction*, terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Sugiono, 2002, *Medode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tjokrowinoto Moeljarto, dkk, 2001, *Birokrasi Dalam Polemik*, Editor Saiful Arif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Widjaja, A.W. 2003, *Etika Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wursonto,Tg. 1998, *Etika Komunikasi Kantor*, Kanisius, Jakarta.
- Yosephus Sinuor L. 2010, *Etika Bisnis pendekatan filsafat moral terhadap perilaku bisnis kontemporer*